

**ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI
PASCA KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

Nama : Intan Purnama
NPM : 1505180057
Program Study : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : INTAN PURNAMA
NPM : 1505180057
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PASCA KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si)

Penguji II

(MUKMIN POHAN, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : INTAN PURNAMA
N.P.M : 1505180057
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI SOSIAL
EKONOMI PASCA KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua tercinta terkasih dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah. Teristimewa Ayah dan ibuku tercinta terkasih tersayang dan yang terhormat.

Banyak sekali yang ingin saya ucapkan, tetapi tidak dapat dituliskan satu persatu, semoga dengan gelar yang saya dapatkan ini bisa membuat kedua orangtuaku bahagia, ilove you 😊

ABSTRAK

Topik ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa ada dampak kebijakan kondisi sosial ekonomi setelah terjadinya otonomi daerah. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa ada dampak kondisi sosial ekonomi setelah terjadinya otonomi daerah di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini melakukan analisis deskriptif untuk melihat kondisi sosial ekonomi, data yang digunakan untuk kondisi ekonomi itu adalah data PDB, Pertumbuhan ekonomi, Struktur ekonomi, infrastruktur, sedangkan untuk kondisi sosial nya data yang digunakan adalah data kemiskinan , IPM, dan pengangguran, yang kedua dalam penelitian ini menggunakan analisis uji beda untuk melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah.

Kata Kunci : PDB, Pertumbuhan ekonomi, Struktur ekonomi, infrastruktur, Kemiskinan, IPM, dan Pengangguran

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alaamiin. Puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan penulis berbagai nikmat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Analisis Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Kebijakan Otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Selatan dengan baik. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil yang diperoleh dari sumber-sumber terkait, seperti Badan Pusat Statistik, dan berbagai jurnal lain yang ada di Indonesia.

Skripsi ini dibuat karena merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata – 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Nasrul dan Ibunda Muslindawati yang selama ini selalu memberikan semangat dukungan, motivasi dan moril serta kasih sayang yang tiada taranya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini..
2. Kakak ku Igha Marsalena S.fram dan Abangku Zaky Afdal ST serta adikku Muna Arrazaq dan Ponaan ku tersayang Annisa Fathiyya Turrahma yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam setiap aspek untuk mencapai hasil ini semua.
3. Keluarga besar yang terus memberikan support sehingga penulis terus dapat terpacu untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS selaku dosen pembimbing yang sangat sabar serta banyak membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan sekaligus dosen metopel yang memberikan banyak ilmu serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman – teman Ekonomi Pembangunan stambuk 2015 yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.
7. Para sahabatku Siska, Mutia , Fani, Fitra, Anty, Wulan, Riska dan Mala yang mewarnai hari-hari semasa kuliah.
8. Para sahabat baruku Anisha Cindy, Kak suly, Nurwatania, Dicky Prasetyo, Dicky Kurnia Sari.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna baik dari isi maupun tata bahasanya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini.

Demikianlah skripsi ini diperbuat, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin...

Wssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

Intan Purnama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakangMasalah	1
1.2 IdentifikasiMasalah.....	11
1.3 BatasanMasalah	12
1.4 RumusanMasalah.....	12
1.5 TujuanPenelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Akademik	12
1.6.2 Manfaat Akademik.....	13
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	14
2.1 Landasan Teorits.....	14
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	13
A. Adam Smith.....	15
B. Aliran Kontrorevolusi neo Klasik/fundamentalisme pasar...21	

C. Analisis Post Keynesian.....	26
2.1.2 Teori Pendapatan Nasional	29
A. Metode Perhitungan GDP berdasarkan Pengeluaran.....	31
B. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan.....	33
2.1.3 Kebijakan Otonomi Daerah	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Konseptual	38
2.4 Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Definisi Operasional	40
3.2.1 Variabel Penelitian.....	40
3.2.2 Defenisi Operasinal Variabel.....	40
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan.....	46
4.1.1 Kondisi Geografi.....	46
4.1.2 Kondisi Demografi.....	49
4.1.3 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi	52

4.1.4 Kondisi Sosial	55
4.2 Analisis Deskriptif Tentang Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan.....	63
4.3 Melakukan Uji Beda Dalam Melihat Indikator Sosial Ekonomi Setelah Menjadi Daerah Hasil Pemekaran	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Selatan.....	9
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Selatan.....	11
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan Dan Luas Wilayah Masing- Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.....	48
Tabel 4.2 Jumlah Kecamatan Dan Luas Wilayah Masing – Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi Daerah	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Selatan Setelah Adanya Otonomi Daerah	51
Tabel 4.5 PDRB Kabupaten Aceh Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sebelum Otonomi Daerah.....	52
Tabel 4.6 PDRB Kabupaten Aceh Selatan Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Setelah Otonomi Daerah.....	53
Tabel 4.7 Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Menurut Lapangan Usaha dan Sektor Utama Atas Dasar Harga Berlaku	54
Tabel 4.8 Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi Daerah.....	57

Tabel 4.9 Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Selatan Sesudah Otonomi	
Daerah	59
Tabel 4.1.0 Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi	
Daerah	61
Tabel 4.1.1 Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Selatan Setelah Otonomi	
Daerah	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Grafik IPM kabupaten Aceh Selatan Sebeum Otonomi Daerah..	58
Gambar 4.2 Grafik IPM Kabupaten Aceh Selatan Sesudah Otonomi Daerah..	59
Gambar 4.3 Grafik Kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi Daerah.....	62
Gambar 4.4 Grafik Kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan Setelah Otonomi Daerah.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi telah banyak dilakukan di beberapa negara seperti negara Asia Timur, yaitu Korea, Jepang, dan Cina serta negara-negara Asean seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Philipina ini terlihat negara-negara tersebut sejak lama memulai usaha-usaha meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang melibatkan pemerintah daerah, partisipasi penduduk lokal dan sektor swasta. Ketiga unsur tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam apa yang disebut desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Ditinjau dari perkembangan sejarah, Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Indonesia yang telah dijajah Belanda selama 350 tahun telah mengadopsi system pemerintahan daerah dari negara tersebut. Sementara Malaysia yang dijajah Inggris menerapkan system pemerintahan dari Inggris. Sedangkan Philipina telah dijajah oleh Spanyol dan kemudian Amerika Serikat banyak mengambil alih pengalaman dari kedua negara itu, dan terutama dari Amerika Serikat. Thailand yang tidak pernah dijajah, banyak terpengaruh oleh system pemerintahan daerah baik dari Eropa maupun Amerika Serikat (kaho, josef riwu.2005).

Negara Malaysia yang mendapat kemerdekaan dari Negara Inggris menganut system pemerintahan daerah dan negara secara perlahan-lahan mengembang system pemerintahan daerahnya yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Ciri-ciri dari undang-undang pemerintah daerah

Malaysia mencerminkan suatu lingkungan sosial, ekonomi dan politik nasional negara Malaysia; yang merupakan bangsa federal terdiri dari 9 kesultanan dan 3 Provinsi (Penang, Sabah dan Sarawak). Pemerintah daerah di negara ini mengalami perkembangan yang tidak menggembirakan. Pernah pemerintah Malaysia mencoba menerapkan pemerintah daerah perwakilan, di mana dewan daerah dipilih, tetapi kemudian karena daerah dianggap belum cukup dewasa untuk suatu proses demokrasi, system pemerintah daerah perwakilan tersebut dihentikan dan para pemimpinnya ditunjuk oleh pemerintah negara bagian.

Di Indonesia proses desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1903, ketika pemerintah Belanda mengeluarkan suatu undang-undang desentralisasi yang disebut dengan "*Decentralizatie Wet*", di mana daerah dibagi-bagi menjadi keresidenan dan kota (*Gementee*). Kemudian pada tahun 1922, pemerintah Hindia Belanda berusaha menyempurnakan pemerintahan daerah dengan mengeluarkan undang-undang restrukturisasi administrasi, di mana *gementee* dibagi menjadi kota dan kabupaten. Pemerintah penjajah kemudian mengeluarkan Ordonansi pemerintah provinsi di Jawa yaitu tahun 1925 pembentukan Provinsi Jawa Barat, 1927 Provinsi Jawa Timur dan 1929 Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang nomor 264 tahun 1937, mengatur daerah otonom di luar Jawa (kaho, josef riwu.2005).

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, undang-undang pertama yang dibuat adalah undang-undang pemerintah daerah (UU No.1 tahun 1945 digantikan oleh UU No.22 Tahun 1948 yang memiliki 5 (lima) butir penting yaitu:

- 1) Dasar implementasi desentralisasi sebagai suatu alat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi rakyat di daerah-daerah;
- 2) Pembentukan tiga tingkat pemerintah daerah otonom: Provinsi (Tk.I), Kabupaten dan Kotamadya (Tk.II), dan Desa, Kota kecil, Nagasai, dan lain-lain (Tk.III);
- 3) Memodernisasi pemerintahan desa;
- 4) Menghapuskan dualism dalam pemerintahan daerah;
- 5) Membentuk daerah-daerah istimewa.

Pada tahun 1950, ketika Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 44 tahun 1950, dimana pemerintah daerah dibagi menjadi tiga tingkat: Provinsi (Tk.I), Kabupaten dan Kotamadya (Tk.II) dan Desa/Kelurahan (TK.III). Sejak itu hingga tahun 1974 baru muncul lagi UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang peraturan pemerintahannya dikeluarkan setelah menunggu 18 tahun yaitu PP No.45 tahun 1992, kemudian pemerintah mengeluarkan lagi UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia maka jumlah provinsi yang ada di Indonesia mengalami penambahan. Penambahan jumlah provinsi ini bukan berarti wilayah Indonesia bertambah luas. Jumlah provinsi yang bertambah merupakan pemekaran dari wilayah provinsi yang sudah ada. Pada saat kemerdekaan, jumlah provinsi yang ada di Indonesia hanya 8,yaitu:

- a) Provinsi Sumatera
- b) Provinsi Jawa Barat

- c) Provinsi Jawa Tengah
- d) Provinsi Jawa Timur
- e) Provinsi Borneo(Kalimantan)
- f) Provinsi Sulawesi
- g) Provinsi Sunda kecil (Nusa Tenggara)
- h) Provinsi Maluku

Pada saat itu,pulau Irian belum menjadi bagian dari negara Indonesia karena pulau Irian masih dibawah kekuasaan Belanda. Seiring berjalannya waktu, setelah Indonesia merdeka jumlah provinsi di Indonesia mengalami perkembangan.Pada tahun 1950 jumlah provinsi bertambah menjadi 11, adapun provinsi yang mengalami pemekaran adalah:1)Provinsi Sumatera, berkembang menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. 2) Provinsi Jawa Tengah, berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.Pada tahun 1956 jumlah provinsi jumlah provinsi bertambah menjadi 15, adapun provinsi yang mengalami pemekaran adalah :1) Provinsi Sumatera Utara berkembang menjadi dua Provinsi, yaitu Sumatera Utara dan DI Aceh. 2)Provinsi Jawa Barat berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. 3)Provinsi Kalimantan berkembang menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.Pada tahun 1957 jumlah provinsi bertambah menjadi 17 provinsi, adapun provinsi yang mengalami pemekaran adalah:1) Provinsi Sumatera Tengah berkembang menjadi 3 provinsi yaitu, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.2) Provinsi Kalimantan Selatan berkembang menjadi dua provinsi yaitu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.Pada tahun 1958 jumlah provinsi menjadi 20 provinsi, provinsi yang

mengalami pemekaran adalah:1) Provinsi Sunda Kecil terbagi menjadi 3 provinsi yaitu, Bali, NTB,NTT.Pada tahun 1959 jumlah provinsi menjadi 21 provinsi, provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.Pada tahun 1960 jumlah provinsi menjadi 22 provinsi, adapun yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sulawesi yang terbagi menjadi Sulawesi Utara dan Tengah serta Sulawesi Selatan dan Tenggara.Pada tahun 1964 jumlah provinsi bertambah menjadi 24 provinsi, adapun yang mengalami pemekaran adalah:1)Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah berkembang menjadi 2 yaitu, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.2) Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara berkembang menjadi 2 yaitu, Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara.Pada 1967 jumlah provinsi bertambah menjadi 25 provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sumatera Selatan berkembang menjadi 2 Provinsi yaitu, Sumatera Selatan dan Bengkulu.Pada tahun 1969 dengan masuknya Irian Jaya menjadi wilayah Indonesia maka pada tahun itu jumlah Provinsi di Indonesia bertambah satu sehingga jumlah Provinsi menjadi 26 Provinsi.Pada tahun 1976 Provinsi menjadi 27 adapun provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi NTT yang terbagi menjadi 2 yaitu, NTT dan Timor timur.Pada tahun 1999 lepasnya Provinsi Timor Timur dari Indonesia menyebabkan jumlah Provinsi berkurang 1 menjadi 26 provinsi dan di tahun ini juga ada beberapa provinsi yang mengalami pemekaran sehingga menjadi 29 provinsi adapun provinsi tersebut adalah 1) Provinsi Maluku mengalami pemekaran yaitu, Maluku dan Maluku Utara. 2) Provinsi Irian Jaya terbagi menjadi 2 Provinsi yaitu, Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat.Pada tahun 2000 jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 32 Provinsi, beberapa

Provinsi mengalami pemekaran diantaranya: 1) Provinsi Sumatera Selatan berkembang menjadi 2 provinsi yaitu, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 2) Provinsi Jawa Barat berkembang menjadi 2 yaitu, Jawa Barat dan Banten. 3) Provinsi Sulawesi Utara berkembang menjadi 2 yaitu, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pada tahun 2002 jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 33 provinsi. Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Riau menjadi Riau dan Kepulauan Riau (Kahar, Josef Riwu, 2005).

Provinsi Aceh yang merupakan salah satu Provinsi yang berada di bagian paling barat Indonesia, terdapat 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 kecamatan dan 6497 Kelurahan setelah adanya otonomi daerah pada tahun 1999. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (LN 2006 no 26, TLN 4633). UU pemerintahan Aceh ini tidak lepas dari nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU pemerintahan Aceh ini antara lain:

- 1) Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan DPRD Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 2) Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
- 3) Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun kabupaten/kota yang banyak diamanatkan dalam UU pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terseenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
- 4) Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
- 5) Implementasi formal penegakan syari'at islam dengan asas personalitas ke-islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang.ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu keputusan perdana Menteri Republik Indonesia Nomor1/Missi/1959 tentang keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU pemerintahan

Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Akibat dari kebijakan otonomi daerah tersebut berdampak terhadap pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Aceh yang salah satunya yaitu pemekaran Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Selatan yang beribukota Tapak Tuan ini pada tanggal 10 April 2002 mengalami pemekaran. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan sosial ekonomi Kabupaten Aceh Selatan secara menyeluruh, yang meliputi : pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek ekonomi, pemekaran ini dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Berikut dapat kita lihat kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012-2016.

Tabel 1.1
Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Di Kabupaten Aceh Selatan (Juta Rupiah) 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2016
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	872.648,99	952.253,43	1.013.232,94	1.096.162,44
Pertambangan Dan Penggalian	166.719,05	189.539,26	201.065,26	186.308,22
Industry Pengolahan	122.406,83	127.997,51	140.386,07	147.486,19
Pengadaan Listrik Dan Gas	2.723,31	2.744,43	2.988,42	3.222,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	662,4	698,93	741,06	822,40
Konstruksi	509.027,39	558.704,45	614.074,90	671.685,11
Perdagangan Besar Dan Eceran, Refarasi Mobil Dan Sepeda Motor	476.349,61	525.709,38	572.821,29	621.784,99
Transportasi Dan Pergudangan	192.099,88	209.852,66	231.208,09	248.721,39
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	15.380,09	16.652,39	18.135,08	19.473,15
Informasi Dan Komunikasi	172.094,91	184.982,75	199.631,21	213.635,84
Jasa Keuangan Da Asuransi	78.289,48	87.272,4	87.530,30	93.953,88
Real Estate	116.597,36	127.737,77	139.956,81	154.373,34
Jasa Perusahaan	20.781,02	21.38,57	23.335,56	24.471,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	391.072,41	434.194,75	471.202,25	526.564,75
Jasa Pendidikan	86.609,17	95.237,26	104.576,74	116.688,85
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	58.022,06	62.424,67	65.382,52	71.013,18
Jasa Lainnya	49.769,69	53.199,63	55.797,90	59.563,27
PDRB	3.331.253,88	3.651.140,68	3.942.066,41	4.255.930,36

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2012 nilai PDRB Kabupaten Aceh Selatan sebesar 3.331.253,88 (rupiah) sedangkan pada tahun 2016 sebesar 4.255.930,36 (rupiah) dengan pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 924.676,48 (rupiah), dengan perkembangan sebesar 2,27% selama lima tahun terakhir. Kemudian sektor lapangan usaha yang paling banyak memberikan kontribusinya terhadap PDRB tersebut adalah Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan. Dengan memberikan kontribusi sebesar 872.648,99 (rupiah) pada tahun 2012 dan 1.096.162,44. (rupiah) pada tahun 2016. Dengan pertumbuhan pada lapangan usaha tersebut sebesar 223.513,45 (rupiah), dengan perkembangan 2,25% selama lima tahun terakhir.

Terkait dengan kewenangan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemekaran memberikan peluang dan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif, namun disisilain kewenangan otonomi yang luas ini memberikan konsekuensi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi sumber keuangan secara optimal. Untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2016

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh selatan	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

IPM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012 sebesar (61,69) di tahun 2013 menjadi sebesar (62,27) dan di tahun 2014 menjadi sebesar (62,35) peningkatan (0,93) ke tahun 2015 sehingga menjadi (63,28) dan mengalami peningkatan lagi (0,85) ke tahun 2016 sehingga IPM menjadi sebesar (64,13). Kesimpulan dari tabel IPM dari tahun 2012 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Disuatu daerah IPM mendekati 100 maka disuatu daerah dianggap kualitas manusia tersebut dikatakan bagus.

Menurut uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Kebijakan Otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Selatan*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Adanya kondisi sosial di Kabupaten Aceh Selatan sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah
2. Adanya kondisi ekonomi di kabupaten Aceh Selatan sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah

1.3 Batasan masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah dimaksudkan untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas, Penelitian ini difokuskan pada perkembangan kondisi sosial ekonomi pasca otonomi daerah.

1.4 Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi di kabupaten Aceh Selatan sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah?
2. Bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi di kabupaten Aceh Selatan setelah menjadi daerah hasil pemekaran?

1.5 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Melakukan analisis deskriptif tentang perkembangan indikator sosial dan ekonomi sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah
2. Melakukan uji beda dalam melihat indikator sosial ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Akademik

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi sosial dan ekonomi sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah.
- 2) Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian tentang

analisis perkembangan kondisi sosial ekonomi pasca kebijakan otonomi daerah.

1.6.2 Non akademik

- 1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi.
- 2) Bagi stakeholder, hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam perkembangan sosial ekonomi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004) dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan,

perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

A. Adam Smith

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka

secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan

meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan Teori Adam Smith

- a. Pengabaian masyarakat secara luas
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

B. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh

merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

C. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan

sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

D. Teori Karl Marx

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menandakan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

1. Menurutnya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap :
2. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
3. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik factor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik factor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang

dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.

4. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki factor produksi utama yaitu tanah.. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sector pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya system fiodal. Kelas borjuis yang memilki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tariff serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum fiodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini
5. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh . Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas
6. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling

membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.

7. Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya :

- a. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
- b. Kesengsaraan, karena kemiskinan semakin luas
- c. Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (over production). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.
- d. Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system

ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

B. Aliran Kontrarevolusi Neo-klasik/Fundamintalisme Pasar

Menurut teori ini pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor : kenaikan kuantitas & kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi.

a. Aliran Neo-Klasik

Aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga (harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang). Neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut:

1. Akumulasi Kapital

Menurut Neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu bunga menentukan tingkat investasi. Perubahan teknologi menurut Neo-klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh/relative lebih bersifat “penghemat buruh” dari pada “penghemat capital”. Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan-permintaan yang kuat akan barang-barang capital.

2. Perkembangan sebagai proses Gradual/terus-menerus

Menurut Alfred Marshall bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organic yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus.

3. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif

Proses yang harmonis & kumulatif ini meliputi berbagai factor dimana factor itu tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total/akan menaikkan pendapatan total dimana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai, sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies & external economies. Internal Economies timbul dari adanya mesin-mesin yang lebih luas manajemen yang lebih baik dan seba gainya sehingga ada kenaikan produksi. External economies timbul adanya kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Marshall menekankan pada adanya sifat saling ketergantungan dan komplementer dari perekonomian. Mengenai kumulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

4. Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu

dan akan selalu akan ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-klasik hal penting untuk pertumbuhan ekonomi ialah kemauan untuk menabung.

5. Aspek internasional perkembangan ekonomi

tingkat perkembangan ekonomi:

- a) Mula-mula Negara meminjam capital/impor capital.
- b) Kemudian Negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan capital pinjaman tadi, membayar deviden dan bunga atas pinjaman tersebut.
- c) Tingkat selanjutnya setelah penghasilan nasional Negara itu meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan kenegara lain yang membutuhkan.
- d) Tingkat keempat, Negara tersebut kemudian sudah menerima deviden dan bunga lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain untungnya semakin sedikit dan hutangnya semakin banyak.
- e) Akhirnya Negara itu hanya selalu menerima deviden dan bunga saja dari Negara lain.

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang pada tahun 1934 diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan

dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle*. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang system kapitalisme akan mengalami kemacetan (*Stagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan *output* masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs*). *Inovasi disini* bukan hanya berarti perubahan

yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut nienyangkut perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonorni akan berkernbang pesat dalam lingkungan masyarakat yang rnenghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya.

a. Analisis post Keynesian

Ahli-ahli post-keynesian ialah mereka yang mencoba merumuskan perluasan teori keynes.post-keynesian memperluas sistem menjadi teori output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisa fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang.

Dalam analisis ini persoalan yang penting ialah:

- a) Syarat yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapat yang mantap (*steady growth*) pada tingkat pendapatan dalam kesempatan kerja penuh (*full employment income*) tanpa mengalami deflasi atau inflasi.
- b) Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau terus menerus.

a. Teori Harrod-Domar

Pada hakikatnya teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantab. Menurut teori Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan.

Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional. mempunyai beberapa asumsi yakni :

- a) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh.
- b) Perekonomian terdiri dari dua sector : sector rumah tangga dan sector perusahaan.
- c) Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
- d) Kecenderungan menabung besarnya tetap.

b. Teori Evsey D. Domar

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut:

- a) Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (*full employment income*)
- b) Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri
- c) Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*)
- d) Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.
- e) *Marginal propensity to savedan Capital coeffisien* adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran. Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah.

c. Teori Harrod

Harrod menyelidiki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi ($GC=IS$) dimana G adalah tingkat pertumbuhan output atau perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu. C adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan pendapatan (I/DY) dan S adalah tabungan.

Investasi dan pendapatan harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh dalam jangka panjang.

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital output dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi.

d. Teori Stagnasi Sekular (*Secular Stagnation*)

Stagnasi sekuler menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang telah masak dimana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Ini menandakan kecenderungan jangka panjang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi. Perumusan sebab-sebab stagnasi sekuler adalah:

- a) Menitik beratkan pada peranan faktor-faktor eksogen seperti teknologi, perkembangan penduduk, pembukaan dan perkembangan daerah baru. Menurut A. Hansen, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menaikkan pendapatan. Menurut Keynes, perkembangan penduduk akan mendorong kenaikan ekonomi, menaikkan daya beli dan dapat memperluas pasar. Tertundanya perkembangan penduduk mengakibatkan akumulasi kapital relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja.
- b) Menitik beratkan pada perubahan-perubahan dasar di dalam lembaga-lembaga sosial seperti meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkembangan organisasi buruh.

c) Menitik beratkan pada faktor-faktor endogen seperti perkembangan persaingan dan konsentrasi-konsentrasi perusahaan dalam industri.

2.1.2 Teori Pendapatan Nasional

Menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. “Pada paruh kedua abad ke-18, Francois Quesney adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *Tableau Economique*, yang membahas *circular flow* dari output dan pendapatan pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuannya tentang aliran memutar atau *circular flow* darah dalam tubuh, Quesney adalah dokter resmi bagi king louis xv dari Prancis”. Manurung (2008).

Ukuran kasar dari pendapatan nasional dikembangkan di Inggris sekitar dua abad lalu, tetapi perhitungan rinci untuk data ekonomi mikro dikembangkan di Amerika selama *The Great Depression*. Hasil berupa sistem perhitungan pendapatan nasional mencakup sejumlah besar data yang dihimpun dari berbagai sumber di Amerika. Data tersebut diringkas dan dirakit menjadi kerangka yang saling terkait, dan kemudian dilaporkan secara priode oleh pemerintah federal. Perhitungan pendapatan nasional Amerika adalah yang paling luas dilaporkan dan yang paling diamati di seluruh dunia. Simon Kuznets sebagai salah satu pengembang perhitungan tersebut memperoleh penghargaan hadiah nobel.

“Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja seseorang menjadi penerimaan orang lain. Ide bahwa belanja sama

dengan penerimaan ini diungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga belanja pada output agregat dicatat pada sisi buku dan pendapatan dari sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi Amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut”. Manurung (2008)

A. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pengeluaran

Seperti telah disebutkan di depan, salah satu cara untuk mengukur nilai GDP adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian dalam satu tahun. Cara paaling mudah dalam memahami pendekatan pengeluaran pada GDP adalah membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen : konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Kita akan membahasnya satu per satu. Manurung (2008)

Konsumsi atau secara lebih spesifik pengeluaran konsumsi perorangan adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi adalah belanja yang paling mudah dipahami dan juga bentuk belanja yang terbesar, yaitu sebesar dua pertiga dari GDP Amerika tahun 1990. Konsumsi meliputi pembelian jasa seperti *dry cleaning*, potong rambut, dan perjalanan udara, pembelian tidak tahan lama seperti sabun,

sop, dan pembelian barang tahan lama seperti televisi dan mebel. Barang tahan lama adalah yang dapat digunakan paling tidak selama tiga tahun.

Investasi, atau secara spesifik *investasi domestik swasta bruto* adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produksi saat ini yang tidak digunakan pada saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru. Meskipun investasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata investasi bernilai sepertujuh dari GDP Amerika selama tahun 1990-an.

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik *konsumsi dan investasi bruto pemerintah*, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan bersalju sampai pembersihan ruang pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Pembelian pemerintah bernilai hampir seperlima dari GDP Amerika selama tahun 1990-an. Pembelian pemerintah, dan juga GDP, tidak mencakup pembayaran tranfer, seperti social security, bantuan pemerintah kepada penerimaan bantuan dalam pengertian sebenarnya.

Komponen terakhir dari pengeluaran agregat adalah hasil interaksi antara perekonomian Amerika dan luar negeri. Ekspor neto sama dengan nilai ekspor barang dan jasa Amerika dikurangi impor barang dan jasa Amerika. Ekspor neto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang (yaitu barang yang dapat anda jatuhkan di atas kaki anda) tetapi juga jasa

(invisibles, seperti pariwisata, asuransi, akuntansi dan konsultasi). mengingat belanja untuk konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah meliputi juga pembelian barang dan jasa, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari GDP Amerika, sehingga kita harus mengurangi impor dari ekspor untuk mendapatkan efek neto dari sektor luar negeri pada GDP. Nilai impor Amerika melebihi nilai ekspor hampir pada setiap selama beberapa dekade terakhir ini, yang berarti bahwa ekspor neto Amerika selama ini selalu negatif.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto yaitu nilai ekspor (X), dikurangi dengan nilai impor (M), atau (X-M). Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP

B. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan *double-entry* dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut yaitu upah, bunga, sewa dan laba dari produksi. Harga *Hershey bar* mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga harga barang permen tersebut sampai di rak grosir. Pendapatan agregat sama dengan semua penjumlahan pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya

digunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa
Pengeluaran Agregat = GDP = Pendapatan Agregat

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. *Double counting* dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna atau dengan cara menghitung nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input dari perusahaan lain. Nilai tambah setiap tahap mencerminkan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

2.1.3 Kebijakan Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuk daerah otonomi daerah yang terbagu dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “ Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang selama ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menurut UU No.22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi daerah otonom, artinya penetapan kebijakan sendiri, serta pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah sendiri (Aser,2005).

Pada masa sebelum otonomi daerah, semua wewenang pemerintah dipegang oleh pemerintah pusat, daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah membuat wewenang pemerintah daerah semakin besar. Kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem

administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Prinsip pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa sekarang ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada daerah tingkat II dan bukan kepada daerah tingkat I atau desa, karena pemerintah daerah tingkat II dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Menurut Arsyad (2005) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Otonomi daerah memiliki tiga asas pada prinsip pelaksanaan. Yaitu :

- a) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
- b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
- c) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Desentralisasi dari aspek fiskal merupakan otonomi keuangan yang meliputi pemberian wewenang penerimaan (*revenue assignment*) dan pengeluaran (*expenditure assignment*) yang memungkinkan daerah dapat memobilisasi sumber-sumber penerimaan dan meningkatkan kapasitas keuangan. Dengan desentralisasi, sebagian atau seluruh fungsi pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah. Pemerintah daerah membiayai pelaksanaan fungsi tersebut dengan PAD yang dihasilkan oleh setiap daerah. Dalam kenyataannya pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk membiayai pelaksanaan program-program daerah dan kegiatan pembangunan dengan hanya mengandalkan potensi PAD. Bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan di daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah pertumbuhan ekonomi daerah semakin kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

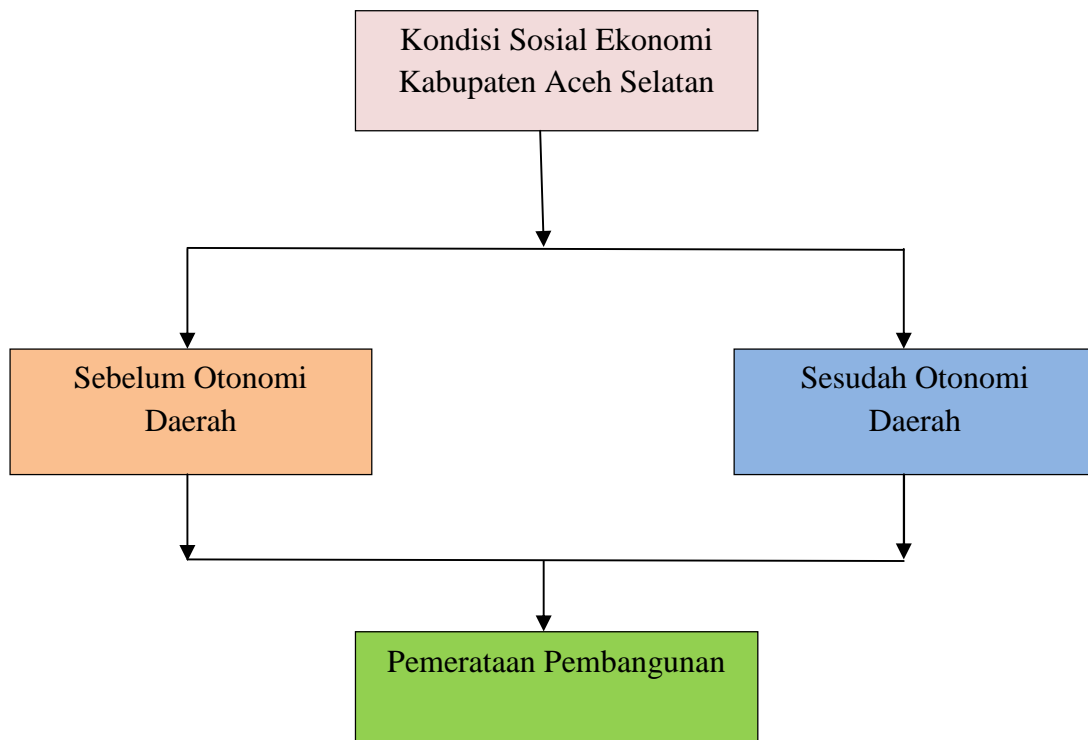
Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
Anggun Nurana Ciptasari	Analisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan ciayunajakuning	rasio belanja pembangunan, tenaga kerja	Terkjadinya fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah selama 1995-2009 dengan total theil kawasan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerataan/penurunan

			ketimpangan perkembangan wilayah dengan hasil uji wilcoxon sebesar 0,500 pada masing-masing daerah dan 0,028 untuk total theil Ciayumajakuning, namun keduanya tidak mengindikasikan pemerataan.
Rizal Ramadhani	Pengaruh otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Sukabumi	Total PDRB, sektor perekonomian, sektor pertanian,	Menunjukkan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan rata-rata sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pada periode otonomi daerah sebesar-0,11 persen menjadi 9,20 persen pada masa otonomi daerah
Muhammad putra	Perubahan sektor-sektor perekonomian Kota Jambi sebelum dan pada masa otonomi daerah	Sektor ekonomi	Pada masa sebelum otonomi daerah, seluruh sektor ekonomi Kota Jambi pertumbuhannya meningkat. Akan tetapi setelah otonomi daerah diberlakukan, seluruh sektor ekonomi di Kota Jambi mengalami pertumbuhan yang lambat.
Sihombing	Dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara	Sektor ekonomi	Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara sebelum otonomi daerah termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lambat, sesudah ada otonomi daerah, pertumbuhan ekonominya menjadi <i>progresif</i> (maju)

2.3 kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur dari suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam operasional. Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah melakukan analisis studi deskriptif tentang perkembangan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan pasca otonomi daerah.

Gambar2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana deskriptif analisis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang perkembangan kondisi sosial dan ekonomi pasca kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Metode dapat memberikan gambaran pada peneliti mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dan pemilihan metode yang tepat dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, (Mudrajad Kuncoro, edisi k.4) menyatakan bahwa suatu penelitian bertujuan untuk mengembangkan, membuktikan, menemukan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari indikator-indikator sosial dan ekonomi. Adapun variabel tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

3.2.1 Variabel penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulannya (Hasan,2002). Secara teoritis, variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini untuk mengukur indikator sosial dan ekonomi yang menggambarkan upaya pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan awal dari kebijakan otonomi daerah. Variabel yang digunakan untuk mengetahui perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi adalah:

- 1) Pertumbuhan ekonomi
- 2) Pertumbuhan PDRB per kapita
- 3) Rasio PDRB kabupaten
- 4) Angka kemiskinan, sedangkan variabel yang digunakan untuk menghitung perkembangan sosial dan ekonomi adalah:
 - a) rasio siswa per sekolah
 - b) rasio siswa per guru
 - c) ketersediaan fasilitas kesehatan
 - d) ketersediaan tenaga kesehatan

3.2.2 Definisi operasional variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Berikut definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1 Indikator Sosial Definisi Operasional

Indikator Sosial:

- Kemiskinan
- IPM
- Pengangguran

3.2 Indikator Ekonomi Definisi Oeprasional

Indikator Ekonomi:

- Pertumbuhan ekonomi
- Perhitungan pendapatan (PDRB/Kapita)
- Infrastruktur
- Struktur ekonomi

3.4 Tempat dan waktu penelitian

3.4.1 Tempat penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Aceh selatan.

3.4.2 Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah 3 bulan terhitung dari bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 .

3.5 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari pihak lain yang telah diproses dan dikumpulkan sebagai hasil atas penelitian yang dilaksanakan sumber data tersebut antara lain:

- 1 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan
- 2 Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5.1 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lgger, agenda dan lain sebagainya (moeleong,2000). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BPS,Bappenas , dinas pemerintahan dan literatur.

3.6 Teknik analisis data

3.6.1 Metode analisis deskriptif

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

3.6.2 Uji beda (*paired sample t-test*)

Variabel independen kualitatif dalam penelitian ini memiliki dua kategori. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian dengan metode uji beda rata-rata untuk dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*). Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian *pre-post* atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana,2012). *Paired sample t-test* digunakan apabila data berdistribusi normal.

Menurut Widiyanto (2013), *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Dasar

pengembalian keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan probabilitas (Asymp.sig) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan probabilitas (Asymp.sig) $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_0 ditolak.

Prosedur uji *paired sample t-test*

- a) Menentukan hipotesis, yaitu sebagai berikut:

H_0 : tidak ada perbedaan kondisi sosial ekonomi pada saat sebelum dan sesudah adanya kebijakan otonomi daerah.

H_{a1} : terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi pada saat sebelum dan sesudah adanya kebijakan otonomi daerah.

- b) Manfaat penelitian
- c) Menentukan *level of significant* sebesar 5% atau 0,5
- d) Menentukan kriteria pengujian

H_0 ditolak jika nilai probabilitas $< 0,05$, berarti terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi pada saat adanya kebijakan otonomi daerah.

H_0 diterima jika nilai probabilitas $> 0,05$, berarti tidak terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi pada saat adanya kebijakan otonomi daerah.

- e) Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambar Umum Kabupaten Aceh Selatan

4.1.1. Kondisi Geografi

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan Ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56km² atau 418.556 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23 24 -030 44 24 LU dan 960 57 36 -970 56 24 BT. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara

Sebelah Timur : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara adminintrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (Delapan Belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas Kecamatan, Mukim, Gampong. Sebagian besar wilayah terdiri dari daratan dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari hutan berbukit-bukit dengan kemiringan curam sampai terjal.

Gambar:4.1 Peta Wilayah Kabupaten Aceh Selatan



Sejak isu pemekaran wilayah dikumandangkan oleh pemerintah pusat seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang N0. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup kawasan andalan pesisir pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh, dimana sebahagian besar dan kawasan pemukiman di perkotaan berbatasan langsung dengan laut dan pesisir pantai barat-selatan. Bentuk dan pola pemukiman yang linear dengan jalan utama telah menghubungkan Kabupaten Aceh Seltan mulai dari jalur jalan Melaboh (Kabupaten Aceh Barat)- Jeuram (Kabupaten Nagan Raya)- Blangpidie (Kabupaten Aceh Barat Daya)- Tapaktuan- Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan) hingga ke daerah-daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatra Utara. Secara geografis kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki arti penting dan strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel 4.2 : Jumlah Kecamatan Dan Luas Wilayah Masing-Masing
Kecamatan Dikabupaten Aceh Selatan Sebelum Pemekaran**

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (ha/KM ²)
		Kelurahan	Desa	
1	Trumon	5	30	1.202,00
2	Bakongan	5	22	954,00
3	Kluet Selatan	5	24	450,00
4	Kluet Utara	3	32	277,00
5	Pasie Raja	3	20	224,00
6	Tapaktuan	2	15	115,00
7	Samadua	4	27	29,00
8	Sawang	4	15	149,00
9	Meukek	4	22	247,00
10	LabuhanHaji	8	40	195,00
11	Manggeng	4	29	105,00
12	Tangan-Tangan	3	21	104,00
13	Blangpidie	5	26	49,00
14	Susoh	4	28	32,00
15	Kuala Bate	2	18	600,00
16	Babahrot	2	7	600,00
Jumlah		63	376	5.332,00

Sumber BPS Kab . Aceh Selatan

Berdasarkan tabel di atas kita bisa melihat jumlah kecamatan dan luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Aceh Selatan pada tabel ini menunjukkan jumlah total kecamatan berjumlah 16 kecamatan , 63 kelurahan dan 376 desa dan total luas wilayah 5.332,00 (Ha) , kelurahan terbanyak terdapat pada kecamatan LabuhanHaji sebanyak 8 kelurahan , trumon bakongan dan kluet selatan sebanyak 5 kelurahan dan jumlah desa terbanyak terdapat pada kecamatan LabuhanHaji.

**Tabel 4.3 : Jumlah Kecamatan Dan Luas Wilayah Masing-Masing
Kecamatan Dikabupaten Aceh Selatan Setelah Pemekaran**

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (ha/KM ²)
		Kelurahan	Desa	
1	Trumon	46	306	737.00
2	Trumon Timur	33	604	465.00
3	Bakongan	47	709	662.00
4	Bakongan Timur	37	587	292.00
5	Kluet Selatan	11	648	190.70
6	Kluet Timur	37	1.213	259.30
7	Kluet Utara	8	1.058	142.94
8	Pasie Raja	9	449	180.56
9	Kluet Tengah	14	1.032	177.50
10	Tapaktuan	8	1.469	115.00
11	Samadua	1	509	29,00
12	Sawang	10	849	149.00
13	Meukek	11	849	247.00
14	Labuhanhaji	5	734	79,74
15	Labuhanhaji timur	5	884	51,46
16	Labuhanhaji barat	5	1.139	63,80
Jumlah		286	13.041	3.842,00

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah adanya pemekaran wilayah, wilayah yang paling dominan jumlah desa nya itu terdapat pada kecamatan Tapaktuan dengan jumlah desa sebanyak 1.469, dan paling rendah itu terdapat di kecamatan Trumon sebanyak 306. Dengan adanya jumlah otonomi daerah di Kabupaten Aceh Selatan maka jumlah keseluruhan luas wilayah itu sebesar 3.842,00 (Ha).

4.1.2. Kondisi Demografi

Demografi menggambarkan berbagai aspek tentang penduduk Kabupaten Aceh Selatan meliputi penyebaran penduduk perkecamatan, laju pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu yang di pengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi juga menggambarkan komposisi dan jumlah penduduk secara keseluruhan

atau kelompok tertentu didasarkan kriteria seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, dan lapangan pekerjaan. Berikut ini tabel penduduk di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
Trumon	7.514	7.134	14.828
Bakongan	6.888	7.186	14.074
Kluet Selatan	10.046	10.029	20.325
Kluet Utara	12.942	13.195	26.137
Pasie Raja	6.705	6.877	13.582
Tapaktuan	9.344	10.179	19.523
Samadua	6.642	7.047	13.689
Sawang	5.889	6.3327	12.216
Meukek	9.042	9.098	18.140
Labuhanhaji	17.521	17.921	35.442
Manggeng	9.930	10.247	20.177
Tangan-Tangan	8.467	8.510	16.977
Blangpidie	11.310	11.382	22.629
Susoh	8.670	8.964	17.634
Kuala bate	8.024	8.202	16.226
Babahrot	8.069	8.355	16.424
Aceh Selatan	147.003	151.083	298.086

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis laki-laki dan perempuan berada di Kecamatan Labuhanhaji dengan jumlah 35.442, laki-laki sebanyak 17.521 jiwa, dan perempuan sebanyak 17.921 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu berada di kecamatan sawang dengan jumlah penduduk sebesar 12.21 jiwa, laki-laki sebanyak 5.889 jiwa dan perempuan sebanyak 6.327 jiwa. Jumlah keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Aceh Selatan itu jumlah laki lakinya sebanyak 147.003 jiwa, dan

perempuan sebanyak 151.083 jiwa, jadi jumlah keseluruhan total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Aceh Selatan itu sebanyak 298.086 jiwa.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Selatan Sesudah Otonomi

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
Trumon	2.344	2.422	4.766
Trumon Timur	4.347	4.491	8.838
Trumon Tengah	2.710	2.801	5.511
Bakongan	2.804	2.897	5.701
Bakongan Timur	2.732	2.822	5.554
Kota Bahagia	3.214	3.321	6.535
Kluet Selatan	6.583	6.802	13.385
Kluet Timur	4.716	4.872	9.588
Kluet Utara	12.122	12.525	24.647
Pasie Raja	8.683	8.927	17.565
Kluet Tengah	3.431	3.545	6.976
Tapaktuan	11.658	12.046	23.704
Samadua	7.990	8.256	16.246
Sawang	7.557	7.809	15.366
Meukek	9.559	9.878	19.437
Labuhanhaji	6.411	6.624	13.035
Labuhanhaji Timur	5.085	5.254	10.339
Labuhanhaji Barat	8.707	8.997	17.704
Aceh Selatan	110.608	114.289	224.897

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Aceh Selatan adalah di Kabupaten Kluet Utara dengan jumlah penduduk 24.647 jiwa, laki-laki sebanyak 12.122 jiwa dan perempuannya sebanyak 12.525 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu terdapat di Kabupaten Trumon yaitu sejumlah 4.766 jiwa, laki-laki sebanyak

2.344 jiwa dan perempuannya sebanyak 2.422 jiwa. Jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk laki laki yang ada di Kabupaten Aceh Selatan itu sebanyak 110.608 jiwa dan perempuannya sebanyak 224.896 jiwa, jadi jumlah keseluruhan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan itu sebanyak 224.897 jiwa.

4.1.3. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.5 PDRB Kabupaten Aceh Selatan Atas Dasar Harga Belaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Sebelum Otonomi Daerah

No.	Lapangan Usaha	Tahun	
		2001	2002
A.	Pertanian,	439.544,67	481.907,95
B.	Pertambangan dan Penggalian	8.998,82	9.988,28
C.	Industri Pengolahan	45.722,33	49.781,80
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.630,28	2.969,15
E.	Konstruksi	123.643,78	142.231,08
F.	Pengangkutan dan komunikasi	34,859,75	40,171,48
G.	Keuangan dan Asuransi	16.163,86	18.381,60
H.	Jasa-jasa	176.469,31	203.447,05
PDRB		1.031.641,93	1.141.307,86

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2001-2002 mengalami peningkatan pada sektor pertanian yaitu sebesar 439,544,67 pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 sebesar 481.907,95, dan sektor yang mengalami penurunan di setiap tahunnya yaitu terdapat di sektor pengadaan listrik dan gas yang terdapat sejumlah 2.630,28 pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 sejumlah 296,15 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan itu pada tahun 2001 jumlah keseluruhannya sebesar 1.031.641,93 dan pada tahun 2002 itu mengalami kenaikan sebanyak 1.141.307,86.

**Tabel 4.6 PDRB Kabupaten Aceh Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun Setelah Otonomi Daerah**

No.	Lapangan Usaha	Tahun	
		2015	2016
A.	Pertanian,	891.481,99	923.194,90
B.	Pertambangan dan Penggalian	173.064,02	164.498
C.	Industri Pengolahan	126.693	127.529,20
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3.434,54	3.710,40
E.	Konstruksi	554.789,81	603.814,50
F.	Pengangkutan dan komunikasi	191.976,68	210.610,22
G.	Keuangan dan Asuransi	71.632,42	90.543,22
H.	Jasa-jasa	52.620,14	60.450,15
PDRB		894.026,653	202.149,757

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor yang tinggi itu terdapat pada sektor pertanian yang setiap tahunnya meningkat, yang kedua itu terdapat pada sektor konstruksi yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, dan sektor yang paling rendah itu terdapat pada sektor jasa-jasa tetapi pada tahun 2015 itu nilai PDRB nya sebesar 52,620,14 dan pada tahun 2016 nya naik menjadi 60.450,15. Dari jumlah keseluruhan total PDRB pada tahun 2015 itu jumlah keseluruhannya sebesar 994.026,653 dan pada tahun 2016 itu menurun sebesar 202.149,757.

A. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, dimana lebih dari 88 persen ditentukan oleh empat sektor utama yaitu, yaitu sektor pertanian sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor administrasi pemerintahan, yang mana pada tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 itu sektor pertaniannya

terus meningkat dari 26,20% , 26,11% , 25,80% , 25,93% dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 25,73%.

Sektor kedua itu adalah sektor konstruksi yang mana pada tahun 2012 sebesar 15,28% , pada tahun 2013 sebesar 15,32%, dan pada tahun 2014 sebesar 15,63%, 2015 itu sebesar 15,89% dan pada tahun 2016 sebesar 16,51%. Sektor selanjutnya yaitu sektor perdagangan juga terus meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, yang mana pada tahun 2016 itu sebesar 14,91%, dan sektor terakhir itu adalah sektor administrasi pemerintahan yang mana pada tahun 2012 itu sebesar 11,74% pada tahun 2013 itu sebesar 11,91% dan 2014 sebesar 11,99% dpada tahun 2015 itu sebesar 12,46% dan pada tahun 2016 itu sebesar 12,95%.

Sektor yang relatif kecil peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Selatan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang hanya memberikan distribusi sebesar 0,46% tahun 2012 0,46% tahun 2013 0,59% tahun 2014, dan pada tahun 2015 itu sebesar 0,47% pada tahun 2016 sebesar 0,46%.

Tabel 4.7 Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Menurut Lapangan Usaha dan Sektor Utama Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012- 2016

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,20	26,11	25,80	25,93	25,73
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,00	5,09	4,98	4,10	3,61
C.	Industri Penggalalian	3,67	3,51	3,57	3,49	3,30
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	15,28	15,32	15,63	15,89	16,51
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	14,30	14,41	14,58	14,71	14,91
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,77	5,75	5,72	5,56	5,20
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,46	0,47	0,46	0,47
J.	Informasi dan Komunikasi	5,17	5,07	5,05	5,05	4,86
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,35	2,39	2,23	2,22	2,20
L.	Real Estate	3,50	3,50	3,56	3,65	3,71
M.	Jasa Perusahaan	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57
N.	Administrasi Pemerintahan	11,74	11,91	11,99	12,46	12,85
O.	Jasa Pendidikan	2,60	2,61	2,66	2,76	2,88
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,71	1,66	1,68	1,68
Q.	Jasa Lainnya	1,49	1,46	1,42	1,41	1,40
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

4.1.4. Kondisi Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor, untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara ekspilisit disebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

1.Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih di jalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

b.Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefenisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.

c.Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk yang mengulang).

d.Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

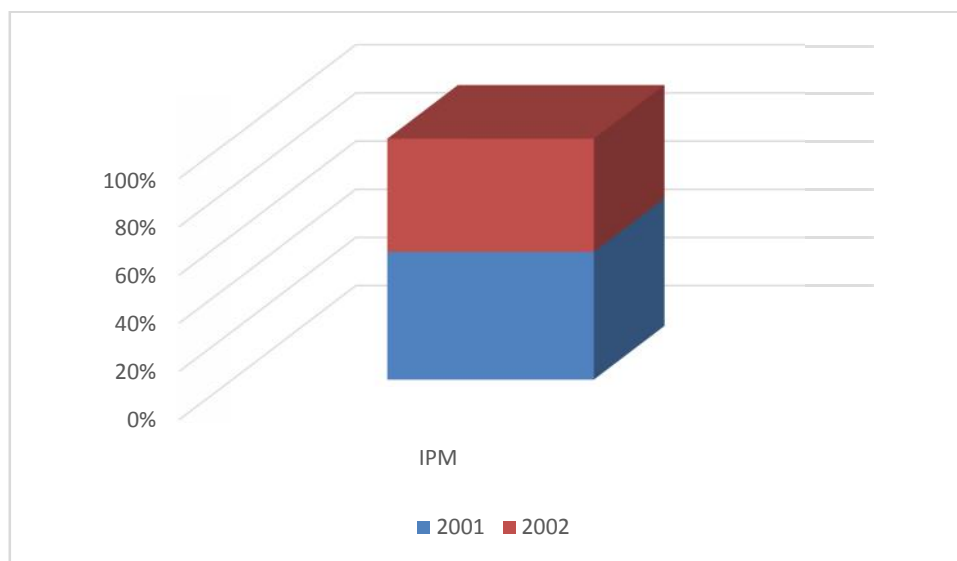
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

**Tabel 4.8 Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Selatan
Sebelum Otonomi Daerah**

Tahun	IPM
2001	69,14
2002	61,22

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Grafik IPM Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi Daerah



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa keadaan IPM di Kabupaten Aceh Selatan sebelum adanya otonomi daerah itu pada tahun 2001 itu sebesar 69,14% dan pada tahun 2002 itu menurun menjadi 61,22 turunnya IPM tersebut disebabkan karena tingginya jumlah penduduk miskin maka akan menurunkan IPM. Hal ini terjadi karena penduduk yang miskin mempunyai keterbatasan dalam mengakses kebutuhan mereka termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan indeks prestasi manusia berhubungan langsung dengan perbaikan indikator-indikator sosial, misalnya angka melek huruf dewasa, angka kematian bayi, perbaikan IPM juga diiringi oleh

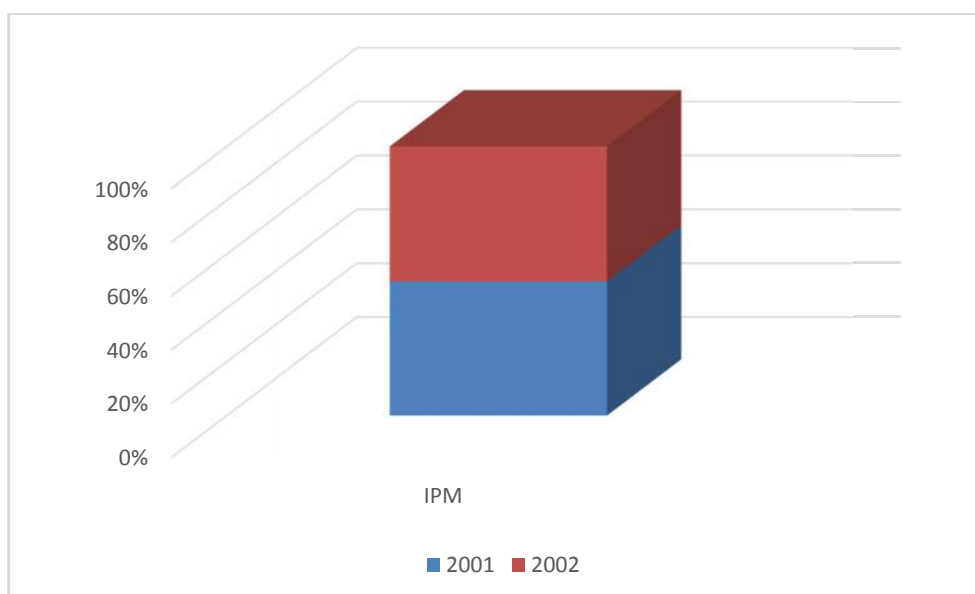
berkurangnya kemiskinan yang mana angka kemiskinan pendapatan juga tidak dapat mengungkapkan kenyataan bahwa seseorang dapat jatuh miskin bukan saja karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, tapi karena tertinggal dalam banyak hal. Misalnya tertinggal dalam hal pendidikan, memiliki tingkat kesehatan buruk, atau hidup dilingkungan yang tidak aman. Keteringgalan semacam ini tergambar secara lebih utuh dalam indeks kemiskinan manusia.

Tabel 4.9 Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Selatan Sesudah Otonomi Daerah

Tahun	IPM
2015	70,71
2016	71,18

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Grafik IPM Kabupaten Aceh Selatan Sesudah Otonomi Daerah



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keadaan IPM Kabupaten Aceh Selatan setelah adanya otonomi daerah itu tingkat IPM nya mengalami peningkatan dilihat dari dua tahun, yang mana pada tahun 2015 itu tingkat IPM nya sebesar 70,71 dan pada tahun 2016 itu meningkat menjadi sebesar 71,18. Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang.

B . Penduduk Miskin

a. Jenis-Jenis Kemiskinan

- Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang dialami oleh anggota keluarga, baik anak, dan orangtuanya. Keadaan ini terjadi dalam kurun waktu tertentu serta sulit bagi mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi, kesehatan memadai, dan kebutuhan lainnya.
- Kemiskinan Subjektif adalah kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat berdasarkan pada hasil pemikirannya sendiri. Seseorang tersebut cenderung ingin mengetakan miskin karena kebutuhan serta keinginannya tidak terpenuhi secara cukup.
- Kemiskinan Relatif adalah kondisi kemiskinan yang seeringkali terjadi pada karakteristik Negara berkembang, yakni perubahan kebijakan pembangunan dalam masyarakat yang tidak merata antara di daerah-daerah maju dan daerah tertinggal, karena kondisi tersebut masyarakat sulit menjual hasil pertanian mereka atau sulit mengakses kemajuan sosial yang ada.
- Kemiskinan Alamiah adalah jenis kemiskinan yang terjadi karena kurangnya masyarakat dalam SDA (Sumber Daya Alam), hal ini

seringkali didasarkan pada tandusnya kondisi tanah, seringkali terkena bencana alam, dan sektor lainnya yang berhubungan dengan alam sekitar.

- Kemiskinan Kultural adalah kondisi kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin
- Kemiskinan Struktural kondisi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat untuk menghubungkan antara sumber daya dengan struktural masyarakat, maksudnya itu adalah sistem sosial yang memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan taraf hidup lebih baik.

Tabel 4.10 Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi Daerah

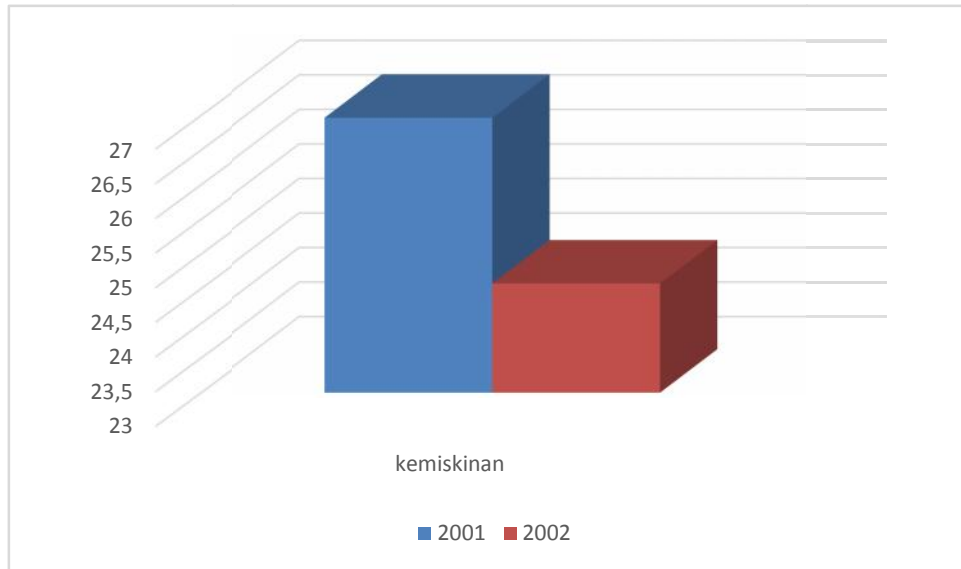
Tahun	Kemiskinan
2001	26,96
2002	24,58

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan pada saat sebelum adanya otonomi daerah pada tahun 2001 itu sebesar 26,96 dan pada tahun 2002 mengalami penurunan 24,58 disebabkan oleh faktor tepat waktunya bantuan sosial dari pemerintah. Penurunan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan

secara nasional ini perlu diapresiasi, karena paling tidak inilah bukti dari usaha pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan.

Grafik Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Otonomi Daerah



Tabel 4.11 Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Selatan Setelah Otonomi Daerah

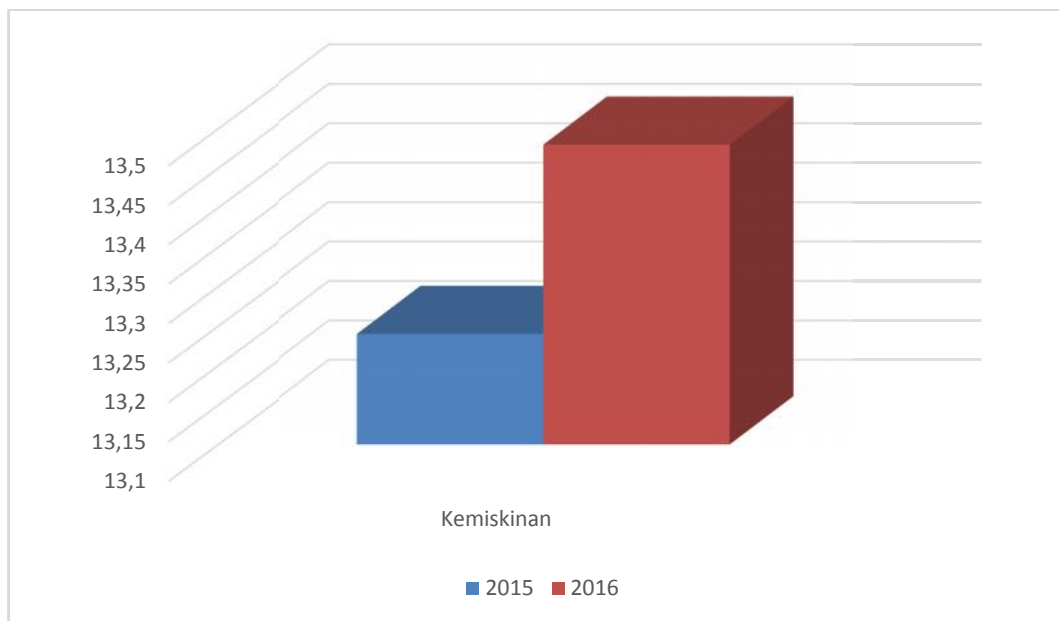
Tahun	Kemiskinan
2015	13,24
2016	13,48

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan pada sebelum adanya otonomi daerah itu tahun 2015 itu sebesar 13,24 dan pada tahun 2016 itu sebesar 13,48. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan itu mengalami kenaikan disebabkan karena karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menyebabkannya menjadi miskin umumnya

adalah malas dan kurang bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai hal, termasuk bekerja dan belajar, yang kedua itu karena faktor keterbatasan fisik tidak jarang juga seseorang menjadi miskin karena memiliki cacat bawaan, dengan keterbatasan itu tentu ia tidak mampu bekerja dengan baik dan optimal, apalagi untuk bersaing dengan orang yang lebih sehat dan memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam melakukan berbagai hal yang dapat menentukan kondisi ekonomi hidupnya.

Grafik Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan Setelah Otonomi Daerah



4.2. Analisis Deskriptif Tentang Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya kekuasaan, ternyata berdampak cara pandang para pemerintahan kita akan bagaimana jalannya pemerintahan selama ini. Terutama hubungan antara pemerintahan pusat

dan daerah yang selama ini bersifat sentralistik. Gagasan otonomi pun semakin mendapat perhatian dan menjadi bahasan yang cukup menyita perhatian. Hal ini semakin diperkuat dengan banyaknya tuntutan yang datangnya dari daerah yang menginginkan wilayahnya mendapat hak otonom.

Sementara itu dalam konteks otonomi daerah, otonomi yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, oeran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI. Artinya otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai hak-hak berupa mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya (pemerintahannya), memilih pimpinan daerah, mengelola aperatur daerah.

Hasil otonomi daerah dapat dilihat dengan beberapa indikator ekonomi ataupun indikator sosial, berikut ini adalah indikator ekonomi yang dapat dilihat bahwasanya otonomi daerah itu memberikan kemakmuran atau tidak terhadap daerahnya. Berikut ini ada beberapa indikator ekonomi yang dapat dilihat sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah.

1. PDB

PDB adalah jumlah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. PDB merupakan alat pengukur dari pertumbuhan ekonomi dimana alat pengukur dari pertumbuhan ekonomi dimana

alat pengukur pertumbuhan pertumbuhan ekonomi adalah PDB, sebagai alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi PDB memiliki rumus dalam mencari PDB. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi. Secara kasar PDB dapat dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi suatu negara, akan tetapi ukuran ini tidak terlalu tepat. Terdapat dua jenis PDB diantaranya, PDB riil/harga tetap yaitu total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu (umumnya satu tahun) dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, yang kedua PDB nominal/harga berlaku yaitu total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu dan dinilai menurut harga yang berlaku pada saat dilakukan penilaian.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu di antaranya yang pertama faktor sumber manusia, sama halnya dengan proses pembangunan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah, yang kedua itu faktor sumber daya alam sebagian

besar Negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya, selanjutnya faktor ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

3. Struktur Ekonomi

Istilah struktur biasa digunakan untuk menunjukkan susunan atau komposisi dari sesuatu, sehingga dapat dipahami bahwa struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian negara maupun daerah. Sektor yang dominan atau yang diandalkan dalam suatu perekonomian akan berada pada kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian negara maupun daerah. Adapun yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang dominan atau diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang paling banyak. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

4. Infrastruktur

Dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlakukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat

berfungsi dengan baik istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, waduk, tanggul, pengolahan limbah. Dalam konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah kota, negara, perusahaan, atau kumpulan orang dengan kepentingan umum. Infrastruktur dapat pula mengacu pada sebuah konsep yang dikembangkan oleh karl marx berartikulasi dengan suprastruktur.

Indikator sosial nya adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Secara umum kemiskinan mempunyai beberapa jenis, yang pertama itu jenis kemiskinan subjektif, kemiskinan subjektif ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Kemiskinan absolut jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang/ keluarga memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan relatif ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan

dan standar kesejahteraan. Kemiskinan alamiah itu adalah kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan bersumber daya alam, hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah, yang terakhir itu adalah kemiskinan kultural ini yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Kemiskinan struktural ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

2. IPM

IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara diseluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklafikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang dan juga mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia memiliki beberapa manfaat yang pertama itu adalah, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang kedua itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Ipm merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum.

3. Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang

mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran berdasarkan sifatnya itu yang pertama adalah pengangguran terbuka itu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau bekerja atau adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan.

Tabel 4.12 Tabel Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Sebelum Pemekaran			Sesudah Pemekaran		
Indikator Ekonomi	2001	2002	Indikator Ekonomi	2015	2016
PDB (Rupiah)	927.007,08	948.172,46	PDB (Rupiah)	3.574.592,0	3.743.403,8
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,82	2,59	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,23	4,72
Struktur Ekonomi yang unggul (%)	<ul style="list-style-type: none"> • pengangkutan dan komunikasi (13,93) • keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan (8,09) • listrik dan air minum (3,68) 	<ul style="list-style-type: none"> • pengangkutan dan komunikasi (17,80) • jasa-jasa (17,11) • bangunan (11,99) 	Struktur Ekonomi yang unggul (%)	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian, kehutanan dan perikanan (25,93) • kontruksi (15,89) • perdagangan besar (14,17) 	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian, kehutanan dan perikanan (25,73) • kontruksi (16,51) • perdagangan besar (14,91)
Infrastruktur (Jenis permukaan)	1.511,67	1.500,02	Infrastruktur (Jenis permukaan)	1.035,57	1.239,55

Jalan, (kilometer)			jalan,(kilometer)		
Sebelum Pemekaran			Sesudah Pemekaran		
Indikator Sosial	2001	2002	Indikator Sosial	2015	2016
Kemiskinan	• jumlah penduduk miskin (26,98)	• jumlah orang miskin (24,58)	Kemiskinan	• jumlah penduduk miskin (13,24)	• jumlah orang miskin (13,48)
IPM	69,14	61,22	IPM	70,71	71,18
Pengangguran	7,71	9,34	Pengangguran	7,73	8,13

Sumber BPS Kab. Aceh Selatan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan indikator sosial ekonomi sebelum maupun sesudah terjadinya pemekaran di Kabupaten Aceh Selatan, adapun indikator ekonomi seperti variabel PDB sebelum adanya otonomi daerah itu pada tahun 2001 sebesar Rp. 927.007,08 dan sedangkan pada tahun 2002 nya sebesar Rp. 948.172,46 tetapi setelah adanya otonomi daerah itu pada tahun 2015 itu sebesar Rp. 3.574.592,0 dan pada tahun 2016 itu jumlah PDB nya sebesar Rp.3.743.403,8. Kemudian pada variabel pertumbuhan ekonomi itu pada tahun 2001 sebesar 1,82% dan pada tahun 2000 naik sebesar 2,59%, tetapi setelah adanya otonomi daerah variabel pertumbuhan ekonomi nya itu pada tahun 2015 sebesar 4,23% dan pada tahun 2016 4,72% dan di variabel struktur ekonomi yang unggul nya itu pada tahun 2001 struktur pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,93% yang kedua sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,09% dan yang ketiga sektor listrik dan air minum 3,68% dan pada tahun 2002 sektor unggulnya itu terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 17,80% yang kedua sektor jasa- jasa sebesar 17,11% dan yang terakhir sektor

bangunan sebesar 11,99% . kemudian setelah adanya otonomi daerah itu pada struktur ekonomi yang unggul pada tahun 2015 itu yang pertama terdapat di sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 25,93% yang kedua sektor konstruksi sebesar 15,89% dan yang terakhir sektor perdagangan besar sebesar 14,17% dan pada tahun 2016 itu struktur ekonomi yang unggul itu terdapat pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 25,73% yang kedua sektor konstruksi sebesar 16,51% dan yang terakhir itu sektor perdagangan besar dengan nilai 14,91%, dan pada indikator ekonomi infrastruknya pada tahun 2001 sebesar 1.511,67% dan tahun 2002 sebesar 1.500,02. Namun setelah adanya otonomi daerah itu pada tahun 2015 infrastruktur di Kabupaten Aceh Selatan 1.035,57% pada tahun 2016 itu mengalami kenaikan sebesar 1.239,55%, sebab menurunnya infrastruktur di Kabupaten Aceh Selatan itu karena adanya bencana alam yang terjadi.

Di indikator sosialnya yang pertama itu yang sektor kemiskinan melihat dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2001 itu sebesar 26,98% dan pada tahun 2002 itu jumlah orang miskin sebesar 24,58% dan setelah adanya otonomi itu pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 13,24% dan pada tahun 2016 itu jumlah orang miskin sebesar 13,48% , dan yang kedua itu sektor IPM sebesar 69,14 pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 itu sebesar 61,22% tetapi setelah adanya otonomi daerah itu pada tahun 2015 IPM nya sebesar 70,71 dan pada tahun 2016 itu sebesar 71,18 yang terakhir sektor pengangguran pada tahun 2001 sebesar 7,71 dan pada tahun 2002 sebesar 9,34 dan setelah adanya otonomi daerah itu pada tahun 2015 sebesar 7,73 dan pada tahun 2016 itu naik sebesar 8,13. Berarti dari jumlah indikator sosial ekonomi

setelah adanya otonomi daerah itu semua sektor sosial dan ekonominya mengalami peningkatan.

4.3 Uji Beda Dalam Melihat Indikator Sosial Ekonomi Setelah Menjadi Daerah Hasil Pemekaran

UJI PAIRED SAMPLE T-TEST

Output *Paired Samples Test* adalah output yang terpenting, karena pada bagian inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan atau contoh kasus dibawah, yaitu mengenai ada atau tidaknya perkembangan indikator sosial dan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah.

Pengambilan keputusan dalam Uji *Paired Sample T-Test* berdasarkan nilai signifikansi:

- Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat pengaruh antara perkembangan indikator sosial dan ekonomipasca otonomi daerah.
- Sebaliknya, jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara perkembangan indikator sosial dan ekonomipasca otonomi daerah.

**KONDISI EKONOMI
PDB**

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair 1	Sebelum-Sesudah				Lower	Upper			
		-	10440121.	7382281	-	-	-36.864	1	.017
		272140773.	91000	.00000	365941546.	178339999.			
		00000			80000	20000			

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,017 < 0,05$. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 bahwa artinya terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat disimpulkan PDBmeningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

PERTUMBUHAN EKONOMI

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair 1	Sebelum- Sesudah				Lower	Upper			
		-2.27000	.19799	.14000	-4.04887	-.49113	-16.214	1	.039

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,039 < 0,05$. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 bahwa artinya terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomimeningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

**STRUKTUR EKONOMI YANG UNGGUL
(Pengangkutan dan Komuikasi dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)**

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Mean	Lower			
Pair 1	Sebelum- Sesudah	-9.96500	2.87792	2.03500	-35.82213	15.89213	-4.897	1	.128

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,128 > 0,05. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05 bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengangkutan dan komunikasi dan pertanian, kehutanan dan perikanan tidak meningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

STRUKTUR EKONOMI YANG UNGGUL (Jasa-jasa dan Kontruksi)

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Mean	Lower			
Pair 1	Sebelum- Sesudah	-3.60000	5.93970	4.20000	-56.96606	49.76606	-.857	1	.549

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,549 > 0,05. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,549 lebih besar dari 0,05 bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat

disimpulkan bahwa jasa-jasa dan kontruksitidak meningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

STRUKTUR EKONOMI YANG UNGGUL (Bangunan dan Perdagangan Besar)

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum- Sesudah	-6.85500	5.56493	3.93500	-56.85392	43.14392	-1.742	1	.332

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,332 > 0,05. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,332 lebih besar dari 0,05 bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa bangunan dan perdagangan besartidak meningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

INFRASTRUKTUR

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum-Sesudah	368.50000	152.02796	107.50000	-997.41701	1734.41701	3.428	1	.181

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,181 > 0,05. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,181 lebih besar dari 0,05 bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat

disimpulkan bahwa infrastrukturnya tidak meningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

KONDISI SOSIAL KEMISKINAN

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum- Sesudah	12.42000	1.86676	1.32000	-4.35219	29.19219	9.409	1	.067

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,067 > 0,05. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,067 lebih besar dari 0,05 bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak meningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum- Sesudah	-5.76500	5.93263	4.19500	-59.06753	47.53753	-1.374	1	.400

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,400 > 0,05. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,400 lebih besar dari 0,05 bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat

pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak meningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

PENGANGGURAN

Paired Samples Test

		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	Df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum- Sesudah	.59500	.86974	.61500	-7.21932	8.40932	.967	1	.511

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,511 > 0,05. Karena nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,511 lebih besar dari 0,05 bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara indikator sosial dan ekonomi pasca otonomi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak meningkat setelah menjadi daerah hasil pemekaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis saya perkembangan kondisi sosial seperti variabel kemiskinan, IPM dan pengangguran setiap tahunnya mengalami kenaikan, dari kondisi ekonomi seperti variabel PDB, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi infrastruktur juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya.
2. Dari analisis uji beda terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah, sesudah otonomi kondisi sosial ekonominya terus mengalami peningkatan.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan, masyarakat juga harus berpartisipasi mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat dalam daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi

membangun atas kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pada dasarnya otonomi daerah ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh, karena itu masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aser, F. 2005. *Tujuan Otonomi Daerah UU no 32 tahu 2004*. Jurnal Otonomi Daerah : 11 45-48
- Arsyad. 2005. *Ekonomi Pembangunan*, STIE, Yayasan Keluarga Pahlawan, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Aceh, Data Aceh Selatan dan Aceh Barat dalam Angka Tahun 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Data Aceh Selatan dalam Angka Tahun 2002.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Data Aceh Selatan dalam Angka Tahun 2003.
- Deddy T, Tikson. 2005. *Indikator-indikator pembangunan ekonomi*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi keempat. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Era Baru Pembangunan Daerah* Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Kaho, Josef, Riwu 2005. *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M.L.Jhingan. 20012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajagrafindo persada. Jakarta.
- Michael.P.Todaro, Stephen C.Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi* Edisi kesebelas. Erlangga. Jakarta.
- Manurung, Mandala. 2008. *Teori ekonomi makro*. Edisi keempat: lembaga penerbit FE UI.
- Pemerintah Pusat. 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Sinar Grafika, Jakarta.

- Putra, A. 2004. *Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian di Kota Jambi Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah* [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusuma. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Graha Indonesia, Jakarta.
- Sihombing, R. E. 2006. *Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Sektor Perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara* [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INTAN PURNAMA
N.P.M : 1505180057
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PASCA
KEBLAJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH
SELATAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/2-2019	Bab IV Abstrak dan Gambaran Umum tentang Suagrat		
21/2-2019	Penyusunan Sebelum dan sesudah landasan Dimasrat - Ekonomi - Sosial & Budaya dalam kerangka		
2/3-2019	Pusat Teori Indikator Utama dan sosial & Sebelum dan Setelah Pemukiman layak & membandingkan		
4/3-2019	Analisis Perbaikan & Indikator + has Sebelum dan setelah lebih dalam lagi		
11/3-2019	Bab IV di awal has ada gbr Peta Kabupaten hulu dan bgs		
13/3-2019	Analisis has Uth lengkap lagi agar Uth bgs dr hal penelitian		
15/3-2019	Ael in Sella direvisi Acc & diujikan		

Medan, 15 Maret 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : INTAN PURNAMA
 N.P.M : 1505180057
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Judul Proposal : ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PASCA KEBLIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
30/6-2019	Tentukan lagi u. uraian per Luar kelas masalah yg dilip dari VOTUS dan IPI	J	
10/7-2019	Tentukan lagi Sum. Anon lagi Laporan BTA dr Indon. - Rp Aceh - Aceh Bers.	J	
17/12-2019	Nanti lg. th. Mnsen + Tjup mll + Indikator pglan. Punt. Ela	J	
27/1-2019	Batas mll dr Nanti lll pks Bab II Struktur pake : Grid dng + Knpk (regulasi)	J	
11/1-2019	Bab II dan Bab III dilip sesuai dgn Mnsen + Tjup mll.	J	
11/1-2019	Perbaiki grafik mng msl + AEC 7 di Sumatera	J	

Pembimbing Proposal

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Medan, ¹⁵Desember 2019
 Diketahui Ditetapkan
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapl. Muchtar Basri No. 1 Medan 20138

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Pada hari ini, **INTAN PURNAMA** tanggal Senin, 28 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar
Jurusan **INTAN PURNAMA** menerangkan bahwa

Nama : **INTAN PURNAMA**
N.P.M. : **1505180057**
Tempat / Tgl. Lahir : **Tapak Tuan, 12 Maret 1997**
Alamat Rumah : **Muchtar Basri**
Judul Proposal : **ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PASCA
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

Disetujui / tidak disetujui :

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Perbaiki identifikasi masalah
Bab II	Perbaiki cuplikan
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Senin, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Sekretaris

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembanding

Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Senin, 28 Januari 2019* menerangkan bahwa:

Nama : INTAN PURNAMA
N.P.M. : 1505180057
Tempat / Tgl.Lahir : Tapak Tuan, 12 Maret 1997
Alamat Rumah : Muchtar Basri
JudulProposal : ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PASCA KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN


Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.*


TIM SFMINAR

Medan, *Senin, 28 Januari 2019*

Ketua

Sekretaris


Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.


Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Pemanding


Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.


Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I


ADE GUNAWAN, S.E., M.M.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1 Medan, Telp. 061 6614667, Kode Pos 20118

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 80/HU-SKRIPSI/PEB/UMSU/26/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 26/11/2018

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Intan Purnama
NPM : 1505180057
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:
Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Analisis Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Selatan
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : Aceh Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pengohon

(Intan Purnama)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mubihar Bazzi No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 83/JUL/SKR/EP/FEB/UMSU/26-11/2018

Nama Mahasiswa
NPM
Program Studi
Konsentrasi
Tanggal Pengajuan Judul
Judul yang disetujui Program Studi

Inisial Purnama
1505180057
Ekonomi Pembangunan

26/11/2018

Nomor

Alternatif judul lainnya atau:

..... (Disisi dan diparaf oleh Program Studi)

Pratiyoga Hariani (Disisi dan diparaf oleh Program Studi)

..... (Disisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Nama Dosen pembimbing
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Pratiyoga Hariani RS, SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(.....)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama: Istia Purwana
NPM: 1501180157
Konsentrasi: Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Halwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau thesis saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkan surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, MARE 2019
Pembuat Pernyataan



ISTIA PURWANA

NB:

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAHASISWA, DOSEN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website <http://www.umsu.ac.id> Email rektorg@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 7577 TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pada Tanggal : 04 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : INTAN PURNAMA
VP M : 1505180057
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Kebijakan otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Selatan

Dosen Pembimbing : Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **04 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 26 Rabiul Awwal 14
04 Desember 2018 M

H. JANUR, SE., MM., M.Si.